

SFAS No. 106: ANALISIS KONSEKUENSI EKONOMI TERHADAP PERUSAHAAN

Muhammad Syam Kusufi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Jl. Raya Kamal PO BOX 2 Kamal, Bangkalan, Madura

Email: kusufi@telkom.net

Abstraksi: *Tulisan ini mencoba menelaah dampak pemberlakuan salah satu standar yang diterapkan di Amerika yaitu Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No.106 yang berjudul "Employer's Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions" (Akuntansi Pemberi Kerja untuk Tunjangan Paspensiun Non Pensiun). Standar ini mengharuskan adanya perubahan dari praktik yang dominan yang mempertanggungjawabkan tunjangan pascapensiun atas dasar kas ke dasar akrual. Konsekuensi ekonomi dari pemberlakuan standar ini adalah adanya kenaikan beban yang sangat besar pada laporan keuangan perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan adanya penurunan tunjangan pascapensiun kesehatan. FASB mewajibkan SFAS No.106 dengan alasan kewajiban untuk memberikan tunjangan pascapensiun memenuhi definisi dari kewajiban, jujur dalam penyajiannya, relevan bagi pemakai laporan keuangan, dan dapat diukur dengan reliabilitas yang memadai pada biaya wajar. Namun, pada kenyataannya banyak pihak yang tidak setuju dengan pemberlakuan standar ini.*

Kata kunci: *konsekuensi ekonomi, SFAS No.106, tunjangan pascapensiun*

1. PENDAHULUAN

Financial Accounting Standard Board (FASB) mengeluarkan Exposure Draft usulan Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) yang berjudul "Employer's Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions" (Akuntansi Pemberi Kerja untuk Tunjangan Paspensiun Non Pensiun) pada bulan Februari 1989. Pernyataan ini menginginkan perusahaan untuk melakukan akuntansi akrual untuk tunjangan kesehatan pensiunan dan tunjangan lain pascapensiun nonpensiun serta mengharuskan kewajiban minimum untuk dilaporkan dalam neracanya. Tunjangan lain pascapensiun nonpensiun meliputi asuransi jiwa yang ditawarkan di luar program pensiun, perawatan gigi serta perawatan medis, perawatan mata, jasa hukum dan pajak, bantuan biaya sekolah, perawatan harian untuk orang tua, dan bantuan perumahan. Perusahaan yang menawarkan manfaat pensiun kepada pegawainya telah menampakkan kepeduliannya tentang standar yang diusulkan tersebut karena akan menambah

beban dan mengurangi *net income* (juga saldo laba dan ekuitas pemilik), dan kenaikan kewajiban. Sejak hampir semua perusahaan melaporkan manfaat pensiun dalam dasar kas, perubahan ke dasar akrual mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap laporan laba rugi dan neraca mereka (Espahbodi, Strock & Tehranian, 1991).

Standar yang diusulkan tersebut membuang metode akuntansi *income increasing* (sebagai contoh adalah dasar kas dalam pelaporan manfaat pensiun yang memperbolehkan pengakuan beban pada periode selanjutnya) dan membatasi *optimal contracting technology*, sehingga perusahaan yang menawarkan program tunjangan tersebut diharapkan mengalami penurunan dalam harga sahamnya. Harga saham juga diharapkan untuk turun saat dasar kas telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengurangi kemungkinan perjanjian hutang yang akan membahayakan kewajiban yang ada. Di sisi lain standar yang diusulkan dapat menaikkan harga saham melalui penurunan biaya politik dengan efek yang lebih kuat terhadap perusahaan yang lebih besar. Harga juga bisa sedikit naik untuk perusahaan dengan dasar *income compensation plan* sebagai standar yang mengurangi kemungkinan manajer untuk menaikkan kompensasinya (Watts & Zimmerman, 1986:286-287).

Beberapa studi yang dilakukan antara lain oleh Collins, Rozeff & Dhaliwal (1981) dan Lys (1984) dalam Espahbodi *et al.* (1991) menunjukkan reaksi harga saham yang negatif terhadap pengenalan peraturan yang membuang metode akuntansi yang dapat menyebabkan *income increasing*. Pengaruh positif yang berhubungan untuk mengurangi biaya politik dan efek kompensasi diharapkan akan lebih besar daripada efek negatif dari biaya kontrak yang optimal dan transfer kesejahteraan lewat kontrak hutang (*debt covenant*).

2. EXPOSURE DRAFT DARI SFAS No. 106

Standar akuntansi yang diusulkan dalam *Exposure Draft*, Akuntansi Pemberi Kerja Untuk Tunjangan Paspensiun Non Pensiun, berhubungan dengan tunjangan kesehatan dan tunjangan paspensiun lainnya. Biaya terbesar kepada pegawai ialah tunjangan kesehatan paspensiun pada saat kenaikan biaya kesehatan pada tingkat inflasi, kenaikan jumlah dan umur pensiunan penurunan dalam kerugian kesehatan.

Exposure draft terdiri dari beberapa konsep yang ada dalam SFAS No. 87 tentang "*Employer's Accounting for Pensions*" dan SFAS No. 88 tentang "*Employers Accounting for Settlement and Curtailments of Defined Benefits Pensions Plans and for Termination Benefits*". FASB menyimpulkan dalam pernyataan usulannya bahwa metode akrual mengakui bahwa tunjangan paspensiun non pensiun adalah tipe kompensasi yang terhutang. Misalnya kompensasi untuk obligasi pegawai selama karir bekerja pegawai tersebut, bukan pada saat pensiun atau setelah pensiun.

Standar akuntansi yang diusulkan dalam *Exposure Draft* akan secara signifikan mengubah pengaruh praktek yang sedang dilakukan untuk mengakui biaya dalam dasar kas dengan mengharuskan akrual terhadap tunjangan paspensiun non pensiun yang dihasilkan oleh pegawai. *Exposure Draft* juga akan mengharuskan kewajiban minimum untuk dicatat dalam neraca. Kewajiban ini sama dengan nilai sekarang dari obligasi yang diharapkan untuk

dibayar kepada para pensiunan dan para pegawai yang masih aktif yang dapat dipilih, nilai wajar bersih dari aktiva.

FASB telah menerima banyak komentar terhadap *Exposure Draft* baik dalam *public hearing* maupun dalam bentuk tertulis. Dari surat yang masuk, 85% mengindikasikan bahwa usulan obligasi akumulasi tunjangan pascapensiun harus diakui. Namun, banyak dari mereka yang menyetujui keandalan dari pengukuran obligasi karena jumlah asumsi yang harus dibuat tentang kecenderungan biaya kesehatan, *rates of return* jangka panjang yang diharapkan dari *plans asset* dan tingkat diskon. Sebagai tambahan, umumnya surat-surat tersebut tidak setuju dengan *Exposure Draft* yang diusulkan tersebut mempengaruhi akhir periode dengan tanggal terpilih untuk program tunjangan dan dengan tanggal efektif. Sebagian besar responden memilih memperluas pengaruh dari obligasi pascapensiun non pensiun yang diharapkan untuk tanggal pensiun yang diharapkan dan tanggal efektif setelahnya, keduanya akan mengurangi pengaruh dari standar terhadap laporan keuangan.

Exposure Draft dari "*Employer's Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions*", akan memerlukan perubahan dalam hal semua pegawai melaporkan tunjangan pascapensiun non pensiun mereka. Akuntansi akrual yang diusulkan akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan dan sebagai hasilnya, telah memberi perhatian yang lebih luas dalam komunitas bisnis dan dari group peneliti yang mencari untuk mengestimasi perubahan dalam net income yang dilaporkan, kewajiban, ekuitas pemilik, dan efek lain yang ada (Espahbodi *et al.*, 1991).

Studi Espahbodi konsisten dengan hipotesis biaya kontrak dan memperbolehkan evaluasi terhadap pentingnya karakter perusahaan yang berbeda dan menjelaskan reaksi pasar terhadap standar akuntansi yang diusulkan. Dari sembilan kejadian (lampiran 1; Tabel 1) yang berhubungan dengan standar yang diusulkan, *abnormal return* dalam tiga hari untuk perusahaan yang diuji diukur di sekitar tanggal pengumuman *Exposure Draft* adalah -3,02%. Sedangkan dari analisis *cross sectional* dari *abnormal return* mengatakan bahwa pengaruh negatif dari pengumuman *Exposure Draft* terhadap harga saham lebih tegas terjadi pada perusahaan yang kekuatan kerjanya kurang matang, perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi, dan perusahaan kecil, dan perusahaan yang sedang melaporkan tunjangan tersebut dalam dasar kas. Hasil tersebut konsisten dengan *contractual cost hypothesis*.

Sedangkan dalam studi Khurana *et al.* (1994), walaupun ada reaksi pasar yang negatif untuk perusahaan reeregulated (Espahbodi *et al.*, 1991), juga ada dasar teoritis untuk memprediksi apakah tidak ada reaksi atau ada reaksi positif terhadap standar akuntansi yang diusulkan. Hipotesis tidak adanya reaksi dimotivasi oleh sifat hubungan antara proses pembuatan peraturan dan prosedur khusus pelaporan keuangan eksternal, sebagai hasilnya, beberapa perusahaan yang menggunakan peraturan dapat terhindar dari biaya tidak langsung yang diharuskan oleh SFAS No. 106. Sedangkan prediksi adanya reaksi pasar yang positif muncul dari pemahaman bahwa peraturan akuntansi dapat mempengaruhi regulator dalam membuat peraturan yang menghasilkan efek aliran kas langsung untuk perusahaan sampel.

Khurana *et al.* (1994) menyimpulkan, industri dengan praktek akuntansi khusus, khususnya industri *regulated* yang aliran kasnya dapat dipengaruhi secara langsung oleh perubahan GAAP, menyediakan kesempatan untuk menguji konsekuensi ekonomik dari perubahan akuntansi yang dimandatkan baik

secara langsung maupun tidak langsung. Studi ini mendokumentasikan reaksi pasar yang secara statistik tidak signifikan terhadap *Exposure Draft* dari SFAS No. 106 untuk industri *public utility* secara keseluruhan, berlawanan dengan reaksi negatif yang besar yang ditemukan untuk sampel yang utamanya adalah perusahaan *non regulated* oleh Espahbodi *et.al* (1991). Hasil ini konsisten dengan pemahaman bahwa investor memandang pengaruh SFAS No. 106 berbeda untuk perusahaan utilitas sejak mereka berharap bahwa *regulatory asset* dibuat untuk mengoffset beban tahunan yang bertambah terhadap peraturan akuntansi perusahaan *non regulated*.

3. KONSEKUENSI EKONOMI DARI SFAS No. 106

Konsekuensi ekonomik dimulai dari *theory of the firm* [Jensen & Meckling (1976) dalam Nurkholis (1999)], yang menyatakan bahwa pada hakikatnya suatu perusahaan merupakan pusat kontrak (*nexus of contract*) diantara pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan eksistensi perusahaan (misalnya antara *principle* dan *agen*). Masing-masing pihak dalam hubungan kontraktual tersebut dianggap sebagai individu yang rasional dan karenanya akan berupaya meningkatkan kesejahteraannya masing-masing. Kontrak yang terkait dengan pemberian bonus seringkali didasarkan pada laba akuntansi (Watts & Zimmerman, 1986:208). *Contractual theory of firm* memberi penjelasan mengenai alasan-alasan pemilihan metode akuntansi dan reaksi perusahaan terhadap regulasi akuntansi.

Selanjutnya Holthausen & Leftwich (1983) dalam Nurkholis (1999) menyatakan bahwa konsekuensi ekonomik dari regulasi akuntansi dapat dilihat dari pengaruh penggunaan metode akuntansi terhadap aliran kas perusahaan, atau kesejahteraan dari pihak-pihak yang akan menggunakan angka-angka akuntansi untuk pembuatan kontrak atau pengambilan keputusan. Reaksi terhadap standar muncul karena kinerja maupun kesejahteraan manajer perusahaan sangat dipengaruhi oleh standar yang ditetapkan tersebut. Sebagai contoh, bila skema bonus untuk para manajer didasarkan pada laba akuntansi, maka para manajer cenderung memilih metode yang dapat meningkatkan laba akuntansi, maka para manajer cenderung memilih metode yang dapat meningkatkan laba akuntansinya. Mereka berusaha untuk memindahkan laba pada tahun-tahun mendatang ke periode sekarang dengan harapan agar bonus yang akan mereka dapatkan lebih besar. Dugaan terhadap perilaku semacam inilah yang disebut sebagai "*bonus plan hypothesis*" [Watts & Zimmerman (1986:208) dan Scott (2003:277)].

Kieso & Weygandt (2001:1156) mengungkapkan beberapa konsekuensi ekonomi dari SFAS No.106 terhadap perusahaan yang mengadopsi standar tersebut, yaitu antara lain :

1. **IBM Corporation** dalam bulan Maret 1991 telah menimbulkan beban sebesar \$2,3 dalam sejarah kuartalan pertama yang dialami IBM.
2. **General Electric Co.** Mengungkapkan bahwa beban yang harus dikeluarkan akibat memakai standar baru FASB mencapai \$2,7 miliar.
3. **AT & T Co.** menyerap beban sebesar \$2,1 miliar sebelum pajak untuk tunjangan pascapensiun selama kuartal keempat tahun 1993.

D'Souza (1998) menyatakan dalam studinya bahwa standar akuntansi yang menyebabkan kenaikan beban biasanya tidak mempunyai dampak aliran kas langsung untuk perusahaan *non regulated*. Tetapi standar tersebut mengurangi laba bersih yang dilaporkan perusahaan dan menambah kewajiban yang dilaporkan. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa manajer dari perusahaan *non regulated* mencoba untuk menghindari biaya kontrak potensial yang berhubungan dengan perubahan akuntansi yang dimandatkan melalui keputusan operasional, pendanaan, atau pelaporan yang meringankan pengaruh dari perubahan akuntansi terhadap laporan keuangan.

Sebaliknya, standar akuntansi yang menyebabkan kenaikan beban biasanya tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih perusahaan *rate regulated*, tetapi mempunyai efek yang positif terhadap aliran kasnya karena mekanisme *rate recovery* berdasarkan angka akuntansi. Manajer dalam perusahaan *rate regulated* mempunyai insentif untuk merespon standar akuntansi yang menyebabkan kenaikan beban yang menambah pengaruh perubahan akuntansi terhadap laporan keuangan. Studi yang dilakukan oleh D'Souza ini menjelaskan bahwa insentif manajerial untuk menggunakan pilihan sukarela untuk mengintensifkan pengaruh laporan keuangan sekarang dari standar akuntansi yang menyebabkan kenaikan beban, lebih besar untuk perusahaan *rate regulated* yang diliputi ketidakpastian yang besar tentang tingkat perbaikan masa yang akan datang. Kedua pilihan sukarela tersebut menaikkan biaya akrual yang dilaporkan menurut *SFAS No. 106*.

Espahbodi *et al.* (1991) dalam studinya mengukur reaksi pasar terhadap usulan perubahan akuntansi untuk tunjangan pensiun. Ia menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan control group, perusahaan yang menawarkan manfaat ini menunjukkan *abnormal return* negatif yang signifikan di sekitar pengeluaran *Exposure Draft*. Selain itu juga ada pengaruh negatif dari standar tersebut terhadap harga ekuitas yang lebih berpengaruh pada perusahaan yang kurang matang, perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi, perusahaan kecil, dan perusahaan yang melaporkan tunjangan pensiun dalam dasar kas.

Pengukuran perkiraan kewajiban tunjangan pascapensiun dan akumulasi kewajiban tunjangan pascapensiun serta biaya tunjangan pascapensiun periodik bersih sangat berbelit-belit dan rumit. Karena adanya ketidakpastian dalam meramalkan biaya kesehatan, tingkat utilisasi, perubahan program kesehatan pemerintah, dan perbedaan yang terjadi dalam asumsi nonmedis (tingkat diskonto, perputaran karyawan, angka pensiun pra-65, perbedaan umur pasangan, dan lain-lain), maka estimasi biaya tunjangan pascapensiun mungkin mengandung margin kesalahan besar. Menurut FASB, kewajiban untuk memberikan tunjangan pascapensiun memenuhi definisi dari kewajiban, jujur dalam penyajiannya, relevan bagi pemakai laporan keuangan, dan dapat diukur dengan reliabilitas yang memadai pada biaya wajar. Kegagalan untuk mengakui kewajiban dan beban sebelum membayar tunjangan akan dianggap sebagai penyajian yang tidak jujur mengenai apa yang seharusnya disajikan oleh laporan keuangan.

FASB mengambil suatu langkah penting dengan mengharuskan tunjangan pascapensiun sebagai suatu kewajiban. Namun banyak yang menentang persyaratan ini dengan memperingatkan bahwa standar tersebut akan merusak laba. Pihak lainnya berpendapat bahwa mencantumkan angka-angka yang "lunak" dalam neraca adalah tidak tepat. Sedangkan yang lainnya

lagi menyatakan bahwa standar ini akan memaksa perusahaan membatasi tunjangan kepada karyawan.

Konsekuensi ekonomik lain dari adopsi *SFAS No. 106* dalam perusahaan yaitu perusahaan mengurangi tunjangan kesehatan. Mittelstaedt, Nichols, dan Regier (1995) dalam studinya mengemukakan alasan-alasan perusahaan untuk mengurangi tunjangan kesehatan. Tiga penjelasan atas keputusan pengurangan itu adalah :

1. Kenaikan biaya kontrak yang disebabkan oleh konsekuensi laporan keuangan dari *SFAS No.106*.
2. Kelemahan keuangan yang independen dari *SFAS No.106*.
3. Kenaikan biaya kesehatan untuk pensiunan bagi perusahaan tertentu.

Studi tersebut juga menguji kenaikan biaya kontrak untuk *debt hypothesis* yang disinyalir sebagai satu diantara beberapa skenario hubungan antara adopsi *SFAS No.106* dan keputusan manajemen untuk mengurangi biaya kesehatan pensiunan. Skenario kedua adalah bahwa manajer mengurangi pengaruh laporan keuangan terhadap *SFAS No.106* sebagai antisipasi dari pengurangan biaya yang berhubungan dengan pendanaan masa yang akan datang. Sedangkan skenario ketiga adalah perlunya pengujian oleh manajer tentang hutang tunjangan kesehatan pensiunan perusahaan, dan sebagai konsekuensinya adalah penurunan tunjangan mendekati saat adopsi *SFAS No.106*.

Pengaruh *SFAS No.106* dan faktor lain dalam keputusan penurunan tunjangan kesehatan merupakan ketertarikan tertentu karena adanya kontroversi di sekitar pengeluaran *SFAS No.106*. Middelstaedt *et al.* (1995) menemukan bahwa 89% penurunan tunjangan kesehatan dibuat dalam tahun adopsi *SFAS No.106* dan efek *SFAS No.106* dalam pertumbuhannya lebih negatif untuk perusahaan yang mengurangi tunjangan dari pada perusahaan yang tidak melakukannya. *SFAS No.106* merupakan penyebab yang penting dalam penurunan tunjangan kesehatan, tetapi bukan satu-satunya motif perusahaan untuk menurunkan tunjangan perusahaan. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memotong tunjangan mempunyai keadaan finansial yang lebih lemah daripada perusahaan yang tidak memotong tunjangan kesehatan.

Dalam hubungannya dengan laporan keuangan yang mengadopsi *SFAS No.106*, Amir (1996) menemukan bahwa informasi dalam program tunjangan pascapensiun yang didanai dan komponen biaya tunjangan pascapensiun bersih berguna untuk modal investor sebagai tambahan informasi pensiun. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa informasi tunjangan pascapensiun diakui oleh investor menjadi berguna ketika dikondisikan pada informasi laba dan pensiun.

Pembuat peraturan (pemerintah) biasanya tahan terhadap kejutan standar. Perusahaan biasanya melarang kemungkinan penggunaan inflasi biaya yang disebabkan oleh *SFAS No.106*. Asumsi jika ada pengaruh akuntansi yang tinggi dari *SFAS No. 106*, misalnya, jika biaya yang diakrualkan *SFAS No.106* relatif besar dibanding dengan pembayaran kas yang sebelumnya dimasukkan dalam peraturan. Jika pengaruh akuntansi dari *SFAS No.106* tinggi, utilitas juga lebih suka untuk mengurangi program tunjangan kesehatan karena mengantisipasi pertahanan terhadap kejutan peraturan. Biaya akrual yang besar dari *SFAS No.106* juga mengindikasikan pegawai yang lebih besar yang berkaitan dengan obligasi yang ditemukan di masa depan, pemberian fasilitas dan insentif

tambahan untuk program tunjangan kesehatan pensiunan yang lebih kecil (D'Souza, 1998).

4. KEWAJIBAN TRANSISI

SFAS No. 106 mengharuskan perusahaan untuk menggunakan akuntansi akrual dan membebaskan beban tunjangan tersebut pada saat dihasilkan pegawai. *SFAS No. 106* memberi pilihan kepada perusahaan untuk mengadopsi alternatif berkaitan dengan bagaimana menghitung biaya akrual periode sebelumnya yang tidak dilaporkan untuk tunjangan yang dihasilkan oleh pekerja ke tanggal adopsi. Pengakuan akrual satu waktu ini disebut sebagai obligasi transisi atau kewajiban transisi. *SFAS No. 106* memperbolehkan perusahaan untuk memilih antara dua metode pengakuan biaya akrual periode sebelumnya yang tidak dilaporkan untuk tunjangan yang dihasilkan oleh pegawai ke periode tanggal adopsi (Ivancevich *et al.*, 1997).

Menurut Kieso & Weygandt (2001:1160) dan Ivancevich *et al.*, 1997), dua metode pengakuan akrual itu yaitu :

1. **Pengakuan langsung (*immediate recognition*)**, dimana jumlah transisi diakui dalam laporan laba rugi sebagai "pengaruh perubahan prinsip akuntansi" (bersih setelah pajak) dan dalam neraca sebagai kewajiban jangka panjang yang berjudul Kewajiban Tunjangan Pascapensiun. Pernyataan kembali laporan keuangan tahunan yang telah diterbitkan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. **Pengakuan yang ditangguhkan (*deffered recognition*)**, di mana pemberi kerja harus mengamortisasi jumlah transisi atas dasar garis lurus sepanjang periode masa kerja rata-rata yang tersisa bagi karyawan yang diperkirakan akan pensiun pada waktu transisi dan yang diperkirakan akan menerima tunjangan. Jika periode masa kerja yang diperkirakan kurang dari 20 tahun, maka pemberi kerja dapat memilih periode amortisasi 20 tahun. Namun jumlah transisi tidak boleh diamortisasi lebih lambat daripada pembayarannya.

Pada awal tahun diberlakukannya *SFAS No. 106*, suatu jumlah transisi (kewajiban atau aktiva) dihitung sebagai perbedaan antara akumulasi kewajiban tunjangan pascapensiun dan nilai wajar aktiva program, ditambah setiap kewajiban akrual atau dikurangi dengan setiap biaya dibayar di muka (aktiva). Karena sebagian besar program tidak didanai dan sebagian besar pemberi kerja mengakui biaya tunjangan pascapensiun ini untuk pertama kalinya, maka timbul kewajiban transisi dalam jumlah yang besar (Kieso & Weygandt, 2001:1160).

Perlakuan akuntansi untuk jumlah transisi ini merupakan salah satu masalah yang paling kontroversial dalam penetapan standar tunjangan pascapensiun. Masalah yang menjadi perhatian utama banyak pihak adalah bahwa pembebanan langsung ke beban sebesar biaya masa lalu yang belum diakui, akan mempunyai dampak negatif yang besar terhadap laba yang dilaporkan dalam tahun terjadinya perubahan itu. Ivancevich *et al.*(1997) menyatakan bahwa pengakuan baru dari hutang ini menghasilkan penurunan modal dan kenaikan beban. Sedangkan Kieso & Weygandt menyatakan bahwa hal yang sama memprihatinkannya bagi pihak lainnya adalah bahwa alternatif

lain yaitu penangguhan dan amortisasi beban tersebut disertai dengan kenaikan kewajiban yang pesat, akan menguras laba yang dilaporkan selama bertahun-tahun. Pemberian opsi untuk melakukan penghapusan langsung atau menangguhkan dan mengamortisasi juga menimbulkan masalah karena tidak adanya komparabilitas yang diakibatkannya. Atas transisi terhadap *SFAS No. 106*, perusahaan dapat memilih pengakuan segera (sebagai efek kumulatif dari perubahan akuntansi) atau menunda pengakuan (sebagai amortisasi selama periode yang tidak melebihi 20 tahun) dari kewajiban tunjangan kesehatan yang ada yang tidak didanai (kewajiban transisi) [Mittelstaedt *et al.* (1995), Kieso & Weygandt (2001)].

Dalam kasus yang lain, total kewajiban diungkap dalam catatan atas laporan keuangan, seperti pensiun, biaya servis, biaya bunga, *return* aktual, dan amortisasi dan komponen terhutang dari beban tunjangan pascapensiun bersih lain juga harus diungkap. Warshawsky *et al.* (1993:195-196) dalam Mittelstaedt (1995) meng-estimasikan bahwa penurunan laba dari *SFAS No. 106* dalam tahun setelah adopsi kira-kira 5% jika kewajiban transisi diakui segera (*immediate recognition*), dan kira-kira 8% penurunan laba jika metode penundaan pengakuan (*deffered recognition*) dipilih. Sebagai tambahan, jika pengakuan langsung dipilih, efek kumulatif dari perubahan akuntansi diestimasikan menyebabkan rata-rata 73% penurunan laba, dan rata-rata 5% kenaikan dalam kewajiban di neraca pada tahun dimana *SFAS No. 106* diadopsi.

Ivancevich *et al.* (1997) menyatakan bahwa banyak perusahaan publik besar yang memilih untuk mengambil metode *one time charge (immediate recognition)* terhadap laba bersih dan membukukan hutang yang tersisa dalam tahun adopsi. Sebagai hasilnya, laba bersih turun hingga mendekati 80%. Faktor yang memotivasi keputusan pelaporan keuangan ini adalah untuk menerangkan efek laporan laba rugi. Walaupun metode ini secara dramatis menurunkan *EPS*, klasifikasi penurunan ini sebagai sebuah efek kumulatif dari perubahan dalam prinsip akuntansi telah diminta oleh banyak perusahaan. Pertama, pendapatan operasional tidak terpengaruh, lebih jauh lagi, klasifikasi ini membuat penambahan terlihat sebagai satu waktu. Pengaruh negatif terhadap *EPS* telah diringankan oleh pengungkapan komponen yang berbeda dari *EPS* dalam laporan keuangan dan karena analisis investasi cenderung untuk mendiskon penambahan satu waktu dalam merencanakan *income* mendatang dan menentukan nilai perusahaan.

Pengakuan yang ditangguhkan (*deffered recognition*) akan menghasilkan penggeseran terhadap *earning* ke periode mendatang. Bahkan lebih buruk lagi, penurunan *earning* ini akan terkubur dalam beban kompensasi. Maka bukan hanya *net income*, tetapi subtotal penting dan pendapatan operasional akan menjadi lebih rendah tiap tahun dengan biaya amortisasi. Keuntungan yang disediakan oleh *one time charge (immediate recognition)* ditambah dengan kerugian *deffered recognition* memacu banyak perusahaan publik besar untuk memilih pengakuan langsung. Sedangkan untuk perusahaan kecil hanya sedikit yang memilih *one time charge* daripada *deffered recognition* (Ivancevich *et al.*, 1997).

5. SFAS No. 132 SEBAGAI PENGGANTI SFAS No. 106

SFAS No. 132 dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 1997 untuk menggantikan *SFAS No. 106*. Pengungkapan tambahan primer yang diharuskan

oleh SFAS No. 132 berhubungan dengan rekonsiliasi perubahan pada neraca awal atau neraca akhir dari tunjangan obligasi dan nilai wajar *plan asset*. Informasi tambahan yang diungkap yaitu tentang program tersebut, membuang beberapa pengungkapan yang tidak lagi berguna untuk diakui, memperbolehkan agregasi yang lebih besar dari pengungkapan program *multiple*, dan mengurangi keperluan pengungkapan untuk entitas non publik (Clark, Sanders & Alexander, 1998).

SFAS No.132 membuang keharusan untuk mengungkap informasi penjelasan umum tentang pensiun pemberi kerja atau rencana pensiun lain. Informasi ini akan secara umum termasuk kelompok-kelompok pemberi kerja, tipe-tipe penghitungan tunjangan, kebijakan pendanaan, dan tipe-tipe aset yang dimiliki. FASB merasa bahwa informasi tersebut telah membatasi kegunaan, terutama pengakuan peraturan agregasi baru yang akan didiskusikan kemudian. Tapi FASB memperbolehkan untuk melanjutkan pengungkapan ini jika pemberi kerja merasa bahwa informasi ini akan berarti untuk pengguna laporan keuangan (Jordan & Clark, 1998)

Menurut Kieso & Weygandt (2001:1165), SFAS No.132 mensyaratkan pengungkapan berikut dalam catatan atas dalam laporan keuangan :

1. Beban pascapensiun selama periode yang bersangkutan, yang secara terpisah mengidentifikasi semua komponen biaya tersebut.
2. Suatu skedul yang menunjukkan perubahan kewajiban tunjangan pascapensiun dan aktiva program selama tahun berjalan.
3. Suatu skedul yang merekonsiliasi status pendanaan program dengan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam neraca pemberi kerja, yang secara terpisah mengidentifikasi pos-pos rekonsiliasi.
4. Asumsi dan persentasi yang digunakan dalam menghitung perkiraan kewajiban tunjangan pascapensiun serta akumulasi kewajiban tunjangan pascapensiun; termasuk asumsi tingkat kecenderungan biaya perawatan kesehatan; asumsi tingkat diskonto; dan pengaruh kenaikan satu persen dalam asumsi tingkat kecenderungan biaya perawatan kesehatan terhadap pengukuran akumulasi kewajiban tunjangan pascapensiun, biaya jasa serta biaya bunga.

6. PENUTUP

Adopsi atas SFAS No.106 telah menimbulkan banyak konsekuensi ekonomik, antara lain adanya pembebanan yang besar dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini terjadi pada beberapa perusahaan, misalnya *IBM Corporation*, *General Electric Co.*, dan *AT & T Company*. Pembebanan yang besar itu terjadi karena adanya pembebanan biaya tunjangan pascapensiun dari dasar kas menjadi dasar akrual sehingga beban periode yang akan datang dibebankan pada periode sekarang sehingga laba akan berkurang sebagai akibat beban yang terlalu besar.

FASB memberikan dua alternatif pengakuan kewajiban transisi, yaitu (1) *immediate recognition*, di mana kewajiban transisi diakui sebagai efek kumulatif dari perubahan akuntansi dan (2) *deffered recognition*, di mana kewajiban transisi diamortisasi dalam periode tidak lebih dari 20 tahun. Namun opsi ini juga menimbulkan masalah karena tidak adanya komparabilitas yang diakibatkannya,

Konsekuensi lain yaitu adanya pengurangan tunjangan pascapensiun yang dilakukan oleh para pemberi kerja kepada para pensiunannya untuk mengurangi beban yang terlalu besar dalam laporan keuangannya. Standar ini menimbulkan banyak akibat yang kurang baik dalam perusahaan. Namun pada tahun 1997 akhirnya diganti dengan SFAS No. 132 dengan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Eli. (1996). The Effect of Accounting Aggregation on the Value Relevance of Financial Disclosures : The Case of SFAS No. 106. *The Accounting Review*, 71(4), 573-590.
- Clark, Stan, Joe Sanders, and Sherman Alexander. (1998). FASB Updates Disclosure Requirements for Pensions and Other Postretirement Benefits. *The Ohio CPA Journal*, 57(September), 56-58.
- D'Souza, Julia M. (1998). Rate Regulated Enterprises and Mandated Accounting Changes : The Case of Electric Utilities and Postretirement Benefit Other Than Pensions (SFAS 106). *Accounting Review*, 73(3), 387-410.
- Espahbodi, Hassan, Elizabeth Strock, and Hassan Tehranian. (1991). Impact on Equity Prices of Pronouncement Related to Nonpension Postretirement Benefits. *Journal of Accounting and Economics*, 14(4), 323-346.
- Ivancevich, Daniel M., Susan H. Ivancevich, Anthony Cocco, dan Roger H. Hermanson. (1997). New Accounting Standards and The Small Business. *CPA Journal*, www.nyscpa.org diakses pada tanggal 10 Januari 2005.
- Jordan, Charles E., & Stanley J. Clark. (1998). Pension and Other Post-Retirement Benefits Disclosure for Closely-Held Companies Under SFAS No. 132. *National Public Accountant*, 43, 41-43.
- Khurana, Inder K., and Martha C. Loudder. (1994). The Economic Consequences of SFAS No. 106 in Rate Regulated Enterprises. *The Accounting Review*, 69(2), 364-380.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield. (2001). *Intermediate Accounting*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Mittelstaedt, H. Fred, William D. Nichols, and Philip R. Regier. (1995). SFAS No. 106 and Benefit Reduction in Employer-Sponsored Retiree Health Care Plans. *The Accounting Review*, 70(4), 535-556.
- Nurkholis. (1999). Konsekuensi Ekonomik dari Regulasi Akuntansi Goodwill: Pengalaman Australia. *Simposium Nasional Akuntansi II*, September, 1-15.
- Scott, W.R. (2003). *Financial Accounting Theory*. New Jersey : Prentice Hall.
- Watts, R.L., and Zimmerman J.L. (1986). *Positive Accounting Theory*. New Jersey : Prentice Hall.

Lampiran 1.

Tabel 1
Kejadian-kejadian yang Berhubungan dengan *Exposure Draft "Employer's Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions"*

Kejadian	Tanggal pengumuman	Keterangan
1.	5 Juli 1984	FASB mengusulkan peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkap dalam catatan kaki (<i>footnotes</i>) dalam laporan keuangan tentang penjelasan informasi tertentu tentang tunjangan kesehatan pascapensiun dan asuransi jiwa.
2.	12 November 1984	FASB membenarkan sebuah peraturan (<i>SFAS No. 81</i>) yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkap dalam catatan kaki (<i>footnotes</i>) dalam laporan keuangan tentang penjelasan informasi tertentu tentang tunjangan kesehatan pascapensiun dan asuransi jiwa.
3.	9 April 1987	FASB mengeluarkan <i>Technical Bulletin 87-1</i> yang menyediakan petunjuk bagaimana pegawai harus menghitung perubahan metode akuntansi untuk tunjangan pascapensiun non pensiun.
4.	17 November 1987	<i>Employee Benefit Research Institute</i> melaporkan bahwa harga saham dapat ditekan jika FASB menginginkan perusahaan untuk menunjukkan kewajiban akrualnya untuk tunjangan kesehatan pensiun dalam neracanya.
5.	5 Mei 1988	Pengumuman bahwa FASB berpindah lebih dekat untuk mengharuskan bahwa cadangan untuk tunjangan kesehatan masa depan bagi pensiunan ditambahkan dalam earnings. Studi dari 76 perusahaan oleh perusahaan konsultaan, <i>TPF & C</i> , menunjukkan bahwa laba dapat turun 50 % untuk beberapa perusahaan.
6.	17 Agustus 1988	Pengumuman bahwa FASB segera akan mengusulkan peraturan untuk mengharuskan perusahaan untuk mengurangi tunjangan medis dan asuransi potensial dari earnings untuk pegawai yang pensiun.
7.	22 November 1988	Pengumuman bahwa rencana FASB untuk mengeluarkan usulan peraturan akuntansi setelah tahun ini. Pengumuman bahwa <i>LTV Corp.</i> Mengadopsi usulan peraturan ini lebih awal dan mencatat \$2,26 juta yang ditambahkan untuk menunjukkan biaya potensial dari tunjangan medis dan asuransi jiwa untuk 118 000 pegawai dan pensiunan.
8.	9 Februari 1989	FASB mengeluarkan <i>Exposure Draft "Employer's Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions"</i> .
9.	5 September 1989	Pengumuman bahwa standar dan poors tidak akan menurunkan tingkat utang perusahaan karena kewajiban yang dilaporkan dari tunjangan pascapensiun non pensiun.
10.	19 Desember 1989	Pengeluaran SFAS NO. 106 " <i>Employer's Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions</i> ".

Sumber : Espahbodi *et al.* (1991)